

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Standar Akuntansi Indonesia beberapa tahun belakang mengalami perubahan yang paling kontroversial dengan diberlakukannya standar yang berbasis IFRS (*International Financial Reporting Standards*). Terjadinya kontroversial IFRS ini menyebabkan perubahan pada PSAK 16 (2012) diantaranya adalah perbedaan pengukuran aset tetap setelah pengakuan awal. Sebelum dikeluarkannya PSAK 16 (2012), aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan aset dikurangi akumulasi penyusutan. Setelah terjadinya konvergensi IFRS, perusahaan dapat memilih menggunakan model biaya atau model revaluasi.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 16 (2018) yang berlaku di Indonesia disebutkan bahwa aset merupakan semua kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan, baik berwujud maupun tidak berwujud yang berharga atau bernilai yang akan mendatangkan manfaat bagi seseorang atau perusahaan yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan menghasilkan manfaat ekonomis dimasa depan.

Revaluasi aset tetap ini membuat beberapa pihak berpendapat bahwa nilai wajar (*fair value*) dari aset tetap lebih relevan untuk keputusan ekonomi sehingga harus digunakan dalam pelaporan aset tetap, disisi lain memberikan kesempatan kepada manajemen untuk memanipulasi laporan pada angka-angka yang akan

menghancurkan kepercayaan investor dan pihak lainnya sehingga tidak diperbolehkan (Wang & Wilkins, 2007 dalam Yulistia M, Fauziati, Minovia, & Khairati, 2015).

Kovergensi IFRS di Indonesia sudah dimulai pada tahun 2008 yang ditandai dengan terdapatnya perubahan-perubahan dalam PSAK sebagai akibat diadopsinya IFRS (Yulistia M et al., 2015). Adanya tujuan dari kovergensi ini memberikan perbedaan antara standar akuntansi dan IFRS di Indonesia. Sehingga terjadinya perubahan pada PSAK 16(2015) dimana membahas tentang revaluasi aset tetap, berdasarkan PSAK16(2015), aset tetap merupakan aset berwujud yang : (a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi, penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan (b) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode (Ikatan Akuntansi Indonesia,2018). Aset tetap digunakan perusahaan dalam periode yang panjang sehingga diperlukan peraturan khusus dalam pencatatan aset tetap.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan PSAK 16 (2015) : Aset tetap sejak proses konvergensi IFRS (*International Financial Reporting Standards*) pada tahun 2012, sebagai panduan bagi entitas yang ingin melakukan revaluasi aset tetap di Indonesia. Revaluasi aset tetap merupakan penilaian kembali aset tetap suatu perusahaan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2018).

Revaluasi aset mendapat dukungan dari pemerintah dengan harapan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan meningkatkan performa finansial perusahaan melalui perbaikan nilai aset sehingga dikeluarkan peraturan terbaru terkait revaluasi aset ini yakni Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2017 tentang penilaian kembali Barang Milik Negara (BMN) dan Peraturan Menteri Keuangan No.111/PMK.06/2017 tentang penilaian BMN yang nantinya kedua peraturan ini akan dijadikan pedoman dalam melakukan revaluasi aset (Handoyo, 2017).

PSAK 16 (Revisi 1994), aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan aktiva tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. PSAK 16 (Revisi 1994) tidak memperkenankan revaluasi aktiva tetap (IAI,2002). Sedangkan pengukuran setelah pengakuan menurut PSAK 16 (IAI,2018) entitas memilih model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama. Pada model biaya, setelah pengakuan aset, aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Sedangkan model revaluasi setelah pengakuan sebagai aset, nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi (Yulistia M et al., 2015).

Pada PSAK 16 (2012) sebelumnya, perusahaan hanya diperbolehkan menggunakan metode biaya dalam merevaluasi pengukuran aset tetapnya. Agar

terciptanya relevansi di dalam suatu perusahaan dalam menjaga nilai aset tetapnya perusahaan perlu memilih suatu kebijakan akuntansi aset tetap yang mencerminkan nilai pasarnya dari aset tetap tersebut. Sejak tahun 2008 dimana revaluasi baru diperbolehkan hingga tahun 2010 pun revaluasi hanya dilakukan oleh sebagian kecil perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Jannah & Diantimala, 2018). Walaupun revaluasi ini telah mengalami konvergensi tetapi dari tahun 2012 sampai pada tahun 2015 mengalami peningkatan, namun masih banyak juga perusahaan yang tidak memilih untuk melakukan revaluasi aset tetapnya. Hal ini disebabkan biaya revaluasi aset tetap yang mahal sehingga mengakibatkan perusahaan tidak melakukan revaluasi aset tetapnya misalnya, biaya audit tambahan untuk revaluasi aset tetapnya terbilang mahal. Beberapa negara yang memperbolehkan revaluasi aset, keputusan untuk memilih melakukan revaluasi tergantung kepada kebijakan manajer (Yulistia M et al., 2015)

Salah satu bukti nyata manfaat revaluasi aset dapat dilihat pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) persero tbk yang membandingkan metode biaya dan model revaluasi. Berdasarkan hasil disimpulkan bahwa model revaluasi memberikan hasil yang lebih baik pada laporan keuangan dibandingkan model biaya. Setelah perseroan melakukan revaluasi aset pada tahun 2015 aset bertambah 8 triliun. Hingga September 2015, aset emiten berkode BBRI tercatat sebesar Rp. 775,82 triliun atau naik 13,5% secara tahunan dari Rp. 683,33 triliun. Adapun rasio kecukupan modal *capital adequacy ratio* (CAR) per September 2015 sebesar 20,59 (Kusuma, 2016).

Berdasarkan kasus diatas revaluasi aset tetap sangat memberikan manfaat bagi perusahaan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan diluar negeri lebih cenderung memilih model revaluasi aset tetap karena dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh investor ekuitas, sehingga informasi yang didapatkan akan lebih relevan bagi para pengguna laporan keuangan (Sukiati & Pertami, 2017). Di Indonesia masih menggunakan model biaya historis karena tidak didukung oleh peraturan perpajakan sehingga perusahaan harus mengeluarkan biaya yang mahal untuk melakukan revaluasi aset (Sukiati & Pertami, 2017). Menurut Soedarwati (2018) kondisi itu akan meningkatkan laba perusahaan dan juga menaikkan nama manajer dan perusahaan itu sendiri, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aktiva tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilaiaktiva tetap dalam laporan keuangan perusahaan.

Seng & Su (2010)meneliti beberapa faktor yang mempengaruhi revaluasi asset. Diantaranya; *political cost*, *debt contracting* dan *information asymetri*. *Politicalcost* (biaya politik) adalah biaya yang dapat dibebankan kepada perusahaan ketika perusahaan memiliki keuntungan yang tinggi yang akan menarik perhatian median dan konsumen sehingga menimbulkan *politicalcost*. Ukuran perusahaan merupakan proksi didalam *political cost*. Menurut Seng & Su, (2010) ukuran perusahaan menjadi faktor yang paling penting dalam keputusan manajer untuk melakukan revaluasi aset.

Perusahaan besar lebih sensitif secara politis dan memiliki transfer kepercayaan yang lebih besar dari perusahaan kecil. Maka dari itu terkait dengan biaya politik, ukuran perusahaan yang besar relatif mengurangi laba agar biaya politik perusahaan berkurang, revaluasi aset tetap diharapkan dapat mengurangi laba karena revaluasi aset dapat meningkatkan nilai aset perusahaan dan dapat meningkatkan biaya depresiasi dari perusahaan. Berkurangnya laba perusahaan diharapkan dapat mengurangi biaya politik perusahaan hal ini dikarenakan semakin besar perusahaan semakin diawasi dan semakin menarik perhatian publik dan pemerintah. Dalam rangka mengurangi perhatian politik tersebut, perusahaan akan memilih metode akuntansi yang menurunkan laba (Wibowo & Lindrawati, 2019)

Penelitian mengenai variabel *political cost* yang diukur dengan ukuran perusahaan dalam hubungannya dengan revaluasi aset tetap perusahaan juga telah dilakukan oleh salah satu penelitian yang dilakukan oleh (Latifa & Haridhi, 2016) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap revaluasi aset tetap perusahaan. Tetapi pernyataan ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wibowo & Lindrawati, 2019) penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap revaluasi aset tetap.

Faktor kedua menurut Seng & Su (2010) adalah *debt contracting*. Penelitian ini menggunakan *leverage* dan arus kas operasi. Revaluasi aset tetap memengaruhi kekuatan perusahaan dalam menegosiasikan kontrak utang dengan debtholders, ada 2

(dua) faktor kontrak utama yang diperiksa dalam studi sebelumnya yaitu *leverage* dan arus kas operasi (Seng & Su, 2010). Perusahaan memilih untuk melakukan revaluasi aset tetap karena mengharapkan nilai perusahaan aset dapat meningkatkan ketika dilakukannya revaluasi aset tetap. Penelitian Seng & Su (2010) tidak berhasil menemukan pengaruh *leverage* terhadap revaluasi aset. Penelitian ini sejalan dengan Yulistia M et al (2015) menyatakan variabel *leverage* dan arus kas operasi tidak ada pengaruh terhadap revaluasi aset tetap. Sedangkan Aziz, Nur, & Yuyetta (2017) menyatakan variabel *leverage* dan arus kas operasi berpengaruh positif terhadap revaluasi aset tetap.

Faktor ketiga menurut Seng & Su (2010) yaitu *information asymmetry*. *Information asymmetry* akuntansi umumnya mengacu pada situasi dimana pengguna eksternal dari laporan keuangan tidak memperoleh informasi lengkap yang disajikan tentang perusahaan. Intensitas aset tetap digunakan untuk mengukur informasi asimetri (Seng & Su, 2010). Penelitian ini menggunakan intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap yaitu variabel yang merupakan salah satu faktor yang diuji terkait dengan informasi asimetri. Informasi asimetri ini terjadi jika salah satu pihak dari suatu transaksi memiliki informasi yang lebih dari pada pihak lain (Scott 2009 dalam Latifa & Haridhi, 2016). Intensitas aset tetap mempresentasikan proporsi aset tetap dibandingkan total asset suatu perusahaan.

Penelitian ini mengangkat variabel independen yang serupa dengan penelitian (Seng & Su, 2010) yaitu *leverage*, arus kas operasi, ukuran perusahaan dan intensitas aset tetap. Dimana keempat penelitian ini masih sedikit yang meneliti dan hasilnya masih belum konsisten. Perbedaan dari penelitian lainnya terletak pada objek penelitian dimana penelitian terdahulu menggunakan objek perusahaan manufaktur, sedangkan penelitian ini pada perusahaan perbankan pada tahun 2014-2018.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat *leverage* berpengaruh signifikan terhadap revaluasi aset tetap?
2. Apakah penurunan arus kas operasi dari aktifitas operasi berpengaruh signifikan terhadap revaluasi aset tetap?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap revaluasi aset tetap?
4. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh signifikan terhadap revaluasi aset tetap?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang :

1. Pengaruh *leverage* terhadap revaluasi aset tetap.
2. Pengaruh penurunan arus kas dari aktivitas operasi terhadap revaluasi aset tetap.
3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap revaluasi aset tetap.
4. Pengaruh intensitas aset tetap terhadap revaluasi aset tetap.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait yaitu:

1. Bagi para investor, kreditor dan manajemen

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan rujukan, mengenai hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam membuat keputusan pada perusahaan misalnya sebagai keputusan investasi bagi investor apakah tetap ingin berinvestasi pada perusahaan yang menerapkan kebijakan akuntansi revaluasi aset tetap. Selain itu, kepada kreditor dan manajer bagaimana keputusan yang baik dilakukan untuk perusahaan yang menerapkan revaluasi aset tetap.

2. Bagi akademisi

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman tentang kebijakan akuntansi tentang revaluasi aset tetap yang dilakukan perusahaan serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.

## 1.5 Sistematis Penulisan

Penulisan skripsi penelitian ini terdiri dari lima (5) bab, dimana sistematis penulisan disusun sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah mengenai tentang pengaruh *leverage*, arus kas operasi, ukuran perusahaan dan intensitas aset tetap terhadap revaluasi aset tetap, serta tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan dalam penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal dari penelitian tersebut

Bab kedua merupakan landasan teori dan pengembangan hipotesis. Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai literatur di dalam penelitian ini. Bab ini memberikan uraian tentang kerangka pemikiran sesuai dengan teori yang relevan dan hipotesis.

Bab ketiga merupakan metode penelitian. Bab ini memberikan uraian tentang hal-hal yang mengenai hasil dan analisis penelitian deskriptif, menilai kelayakan model regresi, uji model fit, uji *nagelkerke's R square*, hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

Bab keempat menguraikan hal – hal mengenai hasil dan analisis dari penelitian statistik deskriptif, menilai kelayakan model regresi, uji model fit, uji *nagelkerke's R square*, hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

Bab lima merupakan penutup. Bab ini memberikan penjelasan bagian akhir dalam penelitian, bagian ini menguraikan tentang kesimpulan pembahasan hasil penelitian secara singkat, keterbatasan penelitian dan saran yang dianjurkan terhadap peneliti.